

**ADAPTASI DESA PESISIR DALAM
MEWUJUDKAN SDGs DESA KABUPATEN KUTAI
TIMUR (STUDI KASUS DESA MANDU PANTAI
SEJAHTERA)**

RENDY SETIAWAN

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 12, Nomor 03, 2025**

ADAPTASI DESA PESISIR DALAM MEWUJUDKAN SDGs DESA KABUPATEN KUTAI TIMUR (STUDI KASUS DESA MANDU PANTAI SEJAHTERA)

Rendy Setiawan¹, Jumansyah²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Desa diimplementasikan di Desa Mandu Pantai Sejahtera dan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap tujuan pembangunan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berasal dari triangulasi data, observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa penyelenggaraan SDGs Desa di Desa Mandu Pantai Sejahtera belum terlaksana secara optimal. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur seperti jalan, sarana dan prasarana penunjang program, serta terbatasnya program-program Pembangunan berkelanjutan untuk mendukung keenam tujuan SDGs Desa yang belum tercapai sebagai standar minimal dalam Pembangunan desa. Mengakibatkan masyarakat belum merasakan manfaat nyata secara sosial maupun ekonomi. Selain itu ketersediaan air bersih di wilayah pesisir masih menjadi permasalahan utama bagi Masyarakat khususnya wilayah RT 001/005.

Kata Kunci : *pemerintah desa, pembangunan berkelanjutan, wilayah pesisir, sdgs desa*

Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 tujuan dan 169 target untuk 15 tahun ke depan, dimulai pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2030. Inisiatif pembangunan Tujuan Pembangunan *Milenium* (MDGs), yang lebih luas dan mencakup lebih banyak negara maju maupun berkembang salah satunya Indonesia, di sempurnakan oleh SDGs (Nasrullah, 2022).

Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa, yang diatur oleh Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, sedang diimplementasikan di Indonesia. SDGs Desa dalam peraturan tersebut merujuk pada inisiatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat pedesaan atau desa.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rrendis208@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Berdasarkan penambahan Budaya Adaptif dan Lembaga Desa Dinamis, SDGs Desa terdiri dari delapan belas target (Yanti & Indahsari, 2024). Untuk mengatasi keadaan khusus desa-desa di Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pemerintah Indonesia menambahkan tujuan ke-18. Khususnya di Indonesia, di mana terdapat banyak sekali desa baik pesisir maupun bukan pesisir setiap desa memiliki ciri khasnya masing-masing.

Tentunya, adaptasi yang dilakukan masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat yang tidak berada di daerah pesisir dengan wilayah yang berdekatan dengan laut. Desa pesisir akan selalu berurusan dengan masalah abrasi pantai. Untuk mempertahankan peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, dan mempertimbangkan aspek lingkungan, pendekatan SDGs Desa secara efektif mengakomodasi potensi bencana di desa-desa (Ismowati et al., 2022).

Untuk itu, upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam hal ini SDGs Desa coba diimplementasikan oleh Desa Mandu Pantai Sejahtera. Berada di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di tepi teluk Sangkulirang, yang berada di wilayah pesisir berdekatan langsung dengan laut.

Melalui data yang terdapat di (<https://mandupantaisejahtera.digitaldesa.id>, 2025). terdapat enam tujuan sampai sekarang belum terpenuhi dari delapan belas tujuan SDGs Desa. Ke enam tujuan tersebut mencakup tujuan ke-09 Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan, tujuan ke-12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, tujuan ke-13 Desa Tanggap Perubahan Iklim, tujuan ke-14 Desa Peduli Lingkungan Laut, tujuan ke-15 Desa Peduli Lingkungan Darat dan tujuan ke-17 Kemitraan Untuk Pembangunan Desa sebagai standar minimal untuk di penuhi dalam pembangunan desa.

Kerangka Dasar Teori

Pemerintah Desa

Di Indonesia, dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas menjelaskan bahwasannya pemerintah desa terdiri dari dua komponen yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Aparat Desa) yang bertanggung jawab terhadap pembangunan desa. Menurut Rasyid dan Labolo dalam Raharjo (2021), pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan, dan regulasi adalah empat kategori utama fungsi pemerintahan. Selain itu, Raharjo (2021) menegaskan bahwa pelayanan pemerintah desa yang efektif hanya dapat diberikan jika pemerintah desa menyadari tanggung jawabnya. Kemampuan pemerintah desa untuk menetapkan peraturan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan warganya dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Saputri (2021) Pembangunan yang dapat terjadi secara terus-menerus dan konsisten sambil menjaga kualitas hidup kesejahteraan masyarakat tanpa membahayakan lingkungan dan dengan mempertimbangkan cadangan sumber daya saat ini untuk kebutuhan masa depan disebut pembangunan berkelanjutan. Empat pilar utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Arus ekonomi, sosial, dan lingkungan diarahkan oleh pilar hukum dan tata kelola ini dalam kerangka yang lebih luas untuk menjaga “Tata Kelola yang Baik”. Metadata indikator SDGs untuk agenda global 2015-2030 merangkum 320 indikator dan target yang membahas lebih dalam tentang keempat pilar ini (Salim, 2010).

Wilayah Pesisir

Menurut Subagiyo dan Wijayanti (2017) wilayah pesisir rentan terhadap bencana, salah satunya yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim. Oleh karena itu untuk meminimalkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang, wilayah pesisir harus dikelola dengan mempertimbangkan strategi mitigasi bencana di masa mendatang. Salah satu metode mitigasi bencana adalah perencanaan spasial dan regional, yang menurunkan kerentanan dan meningkatkan ketahanan dengan mencegah, menghindari, atau menghilangkan bahaya lokal.

SDGs Desa

Menurut Sayuti (2022), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai SDGs Desa, adalah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat saat ini dengan memaksimalkan semua potensi dalam mencapai tujuan dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif.

SDGs Desa adalah lokalisasi dari SDGs dan merupakan sumber informasi utama untuk pembangunan desa jangka menengah di seluruh Indonesia Menurut Iskandar (2020). SDGs Desa mencakup delapan belas tujuan berikut, beberapa diantaranya harus dicapai pada tahun 2030 :

1. Desa Tanpa Kemiskinan: Sasaran yang harus dicapai di desa diantaranya, 100% penduduk desa memiliki kartu asuransi kesehatan; 100% individu miskin penyandang disabilitas dan kepala rumah tangga perempuan (PEKKA) menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; cakupan layanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, penggunaan alat kontrasepsi, akses air minum bersih dan sanitasi bagi 40% penduduk berpenghasilan terendah; akses dan layanan pendidikan; perumahan yang layak bagi penduduk berpenghasilan rendah; dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2. Desa Tanpa Kelaparan: Pencapaian tujuan ini melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, mendorong teknologi dan akses pasar, menciptakan sistem produksi pangan berkelanjutan, dan menambah nilai pada hasil pertanian.
3. Desa Sehat dan Sejahtera: Pemerintah desa dan pemerintah tingkat atas desa harus menjamin bahwa masyarakat desa memiliki akses terhadap asuransi kesehatan layanan kesehatan yang terjangkau agar dapat memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa.
4. Pendidikan Desa Berkualitas: Akses ke sekolah berasrama islam, ketersediaan layanan pendidikan berkualitas tinggi dan terjangkau bagi warga desa, serta akses warga terhadap layanan pendidikan terakreditasi adalah beberapa tanda yang dapat dilihat.
5. Keterlibatan Perempuan Desa: Ketersediaan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa, baik sebagai pejabat desa maupun dalam Badan Perwakilan Desa (BPD), usia rata-rata perempuan menikah pertama kali, layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan, serta partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa merupakan indikator yang dapat dilihat.
6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi: Sejumlah metrik, termasuk akses 100% rumah tangga terhadap air minum bersih dan sanitasi pada tahun 2030, penggunaan air minum yang efektif, dan inisiatif untuk melestarikan dan memulihkan ekosistem yang terkait dengan sumber daya air, seperti pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau, dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan SDGs Desa ini.
7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan: Sejumlah indikator, seperti konsumsi listrik rumah tangga di desa-desa yang mencapai minimal 1.200 kWh, rumah-rumah di desa yang menggunakan gas atau limbah kayu untuk memasak, dan adopsi bauran energi terbarukan di desa-desa, dapat digunakan untuk mengukur apakah tujuan ini tercapai pada tahun 2030.
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata: Integrasi angkatan kerja ke dalam pasar tenaga kerja, pembentukan program kerja berbayar lokal yang dapat mempekerjakan separuh angkatan kerja desa, dan tempat kerja yang menawarkan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas medis, semuanya merupakan indikator tercapainya tujuan ini.
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan: keberhasilan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa maupun supra desa, diantaranya: kondisi jalan yang andal; dermaga/tambatan perahu; pertumbuhan industri di desa; serta kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi desa.
10. Desa Tanpa Kesenjangan: salah satu indikator dapat dilihat dari tujuan ini yakni kebijakan yang memperkecil kesenjangan antar warga seperti pelatihan kerja.
11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman: terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dengan beberapa target capaian

kawasan pemukiman yang bersih dan sehat, terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat, serta terbangunnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan desa.

12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan: indikator yang dapat dilihat dari kebijakan desa yang mengatur pengelolaan limbah dunia usaha; terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya alam; serta usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampai dunia usaha.
13. Desa Tanggap Perubahan Iklim: keberhasilan tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan indeks risiko bencana di desa.
14. Desa Peduli Lingkungan Laut: keberhasilan tujuan ini dapat dilihat dari kebijakan desa terkait perlindungan sumber daya laut, penangkapan ikan secara wajar, serta tidak terjadinya *Illegal Fishing*.
15. Desa Peduli Lingkungan Darat: keberhasilan tujuan ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah desa terkait upaya perlindungan sumber daya hayati, luas lahan terbuka hijau, serta jumlah satwa terancam punah.
16. Desa Damai Berkeadilan: keberhasilan tujuan ini dapat dilihat dari tidak adanya kejadian kriminalitas, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan terhadap anak, lestarnya budaya gotong royong, meningkatnya demokrasi, serta tidak adanya perdagangan manusia dan pekerja anak.
17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa: sejumlah metrik kinerja, seperti keberadaan dan jenis kolaborasi desa dengan pihak luar, ketersediaan jaringan internet di dalam desa, statistik desa, serta komoditas dan kegiatan ekspor desa.
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif: keberlanjutan inisiatif saling membantu dan kerja sama, keterlibatan pemimpin agama dalam inisiatif pembangunan desa, perlindungan terhadap kelompok rentan dan anak yatim piatu oleh penduduk desa, pelestarian budaya desa, dan penyelesaian masalah masyarakat dengan pendekatan budaya.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang merupakan suatu metode dalam meneliti beragam kasus dari waktu ke waktu dengan pengumpulan data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini untuk mendeksripsikan serta memaparkan mengenai masalah - masalah yang terjadi sehingga lebih komprehensif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan

Indikator tujuan SDGs Desa ke-09 terkait kondisi jalan yang dapat diandalkan, baik jalan pertanian maupun jalan utama desa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini. SDGs Desa ini juga menekankan

inovasi di semua bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk implementasinya, masih terdapat sejumlah tantangan di Desa Mandu Pantai Sejahtera. Hal ini disebabkan selain keterbatasan material timbunan jalan yang sejauh ini hanya didapatkan dari perusahaan PT SKP. Jalan usaha tani tersebut juga dilalui oleh alat berat yang membuat jalan mudah cepat berlubang. Tidak hanya itu hujan juga menjadi faktor rusaknya untuk struktur jalanan tanah bebatuan apalagi perbaikan jalanan hanya dilakukan ketika tersedianya material timbunan. Terlepas dari persoalan jalan, minimnya pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat dikarenakan kurangnya keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Membuat masyarakat cenderung belum merasakan manfaat secara optimal dari pembangunan desa yang ada saat ini.

Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

Indikator tujuan SDGs Desa ke-12 terkait kebijakan pengelolaan limbah dunia usaha sampai rumah tangga di desa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini. Untuk implementasinya di Desa Mandu Pantai Sejahtera belum ada peraturan desa yang secara langsung mengatur keberhasilan tujuan SDGs ini. Salah satu alasan utama belum ada pengelolaan sampah dan daur ulang yang mandiri adalah keterbatasan fasilitas pemilahan serta peralatan pengelolaan sampah di desa, selain itu, belum terdapatnya juga program-program yang membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan untuk bisa membuat sampah yang tidak ada harganya menjadi sesuatu yang bermanfaat, baik dari pemerintah desa ataupun pemerintah daerah. Sehingga kebanyakan masyarakat di Desa Mandu Pantai Sejahtera hanya membuang sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) atau dengan cara dibakar.

Desa Tanggap Perubahan Iklim

Indikator tujuan SDGs Desa ke-13 terkait inisiatif masyarakat menanggapi, beradaptasi, dan mempersiapkan diri menghadapi semua jenis perubahan iklim, termasuk kekeringan dan banjir yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini. Untuk implementasinya, di Desa Mandu Pantai Sejahtera tidak memiliki riwayat bencana alam seperti banjir dan kekeringan berkepanjangan. Namun karena lokasinya di tepi laut, Desa Mandu Pantai Sejahtera yang berpenduduk sekitar 852 jiwa dan terdiri dari dua dusun dan enam (RT), mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Untuk wilayah yang paling terdampak adalah RT 001 dan 005, dimana ketika air laut pasang sumur-sumur masyarakat tercemar oleh air laut. Kondisi ini membuat akhirnya sebagian masyarakat tetap menggunakan air tersebut untuk keperluan mandi dan mencuci, meskipun kualitasnya tidak layak untuk digunakan. Selain itu, masyarakat seringkali harus membeli air bersih, yang tentunya menambah beban keuangan masyarakat. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Desa Mandu Pantai Sejahtera, sebuah dusun tepi laut, adalah terbatasnya akses terhadap air minum. Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) belum menjangkau masyarakat

karena jaraknya yang jauh dari kecamatan. Pemerintah desa berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melalui perbaikan embung yang diharapkan dapat menjadi sumber air bersih bagi masyarakat. Namun keterbatasan sarana dan prasarana pendukung membuat pelaksanaan program belum dapat terealisasi secara optimal.

Desa Peduli Lingkungan Laut

Indikator tujuan SDGs Desa ke-14 terkait kebijakan desa untuk pelestarian sumber daya laut yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini. Untuk implementasinya, di Desa Mandu Pantai Sejahtera belum ada peraturan desa yang secara khusus mengatur keberhasilan tujuan SDG Desa ini. Namun karena wilayah secara geografis berdekatan dengan laut, sebagian masyarakat mencari nafkah sebagai nelayan dengan menggunakan alat tangkap yang masih sangat ramah lingkungan. Untuk mendukung operasional mereka pemerintah desa juga menyediakan perahu dan alat penangkapan ikan kepada para nelayan. Meskipun demikian, potensi sumber daya laut belum dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya program pelatihan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian nelayan dalam mengembangkan hasil tangkapan mereka.

Desa Peduli Lingkungan Darat

Indikator tujuan SDGs Desa ke-15 terkait kebijakan pemerintah desa yang berhubungan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini. Untuk implementasinya, di Desa Mandu Pantai Sejahtera tidak ada peraturan desa yang secara eksplisit mengatur pencapaian tujuan SDGs Desa Tersebut. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Desa Mandu Pantai Sejahtera seluas 0,95 kilometer persegi telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan untuk lahan terbuka hijau sangat terbatas, dan berimplikasi terhadap keseimbangan ekosistem desa serta menurunkan keanekaragaman hayati di Desa Mandu Pantai Sejahtera. Nilai jual sangat tinggi dan prospek ekonomi yang menjanjikan dari kelapa sawit membuat masyarakat lebih banyak membuka lahan baru untuk budidaya kelapa sawit ketimbang tanaman pangan. Walaupun demikian pemerintah desa tetap berupaya melindungi kawasan daratnya dengan membuat organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA). Bekerja sama dengan pihak terkait lainnya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Kemitraan Untuk Pembangunan Desa

Untuk mencapai target pembangunan desa ini, target Pembangunan Berkelanjutan SDGs Desa ke-17 adalah cara untuk membangun dan menghidupkan kembali kemitraan guna mencapai semua tujuan Pembangunan Berkelanjutan lainnya. dengan indikator terkait kehadiran dan jenis kerja sama

dengan pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini. Untuk implementasinya, di Desa Mandu Pantai Sejahtera, dengan wilayah yang berdekatan dari perusahaan PT SKP membawa kerja sama dengan pihak swasta terjalin. Selain bantuan perbaikan jalan ada juga bantuan CSR untuk sumber daya manusia dalam bidang pendidikan melalui intensif guru sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di desa. Dalam bidang kesehatan, perusahaan turut membantu melalui bantuan makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita guna mendukung program perbaikan gizi masyarakat dan pencegahan *stunting*. Serta ekonomi yang masih terkendal oleh minimnya tanaman pangan di desa karena telah di dominasi oleh perkebunan kelapa sawit.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari penelitian yang berjudul “Adaptasi Desa Pesisir Dalam Mewujudkan SDGs Desa Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Desa Mandu Pantai Sejahtera),” pada hasil penelitian, penyajian data, dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Desa Mandu Pantai Sejahtera menghadapi tantang signifikan dalam infrastruktur dan inovasi, di mana perbaikan jalan terhambat oleh keterbatasan material dan kurangnya transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Akibatnya, masyarakat cenderung belum memperoleh manfaat secara maksimal dari program pembangunan desa yang berjalan saat ini, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

Dalam aspek konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, masyarakat masih bergantung pada cara tradisional seperti membakar dan membuang sampah tempat pembuangan akhir (TPA) karena tidak adanya program khusus dari desa atau pemerintah daerah untuk membangun kesadaran lingkungan yang modern. Meskipun Desa Mandu Pantai Sejahtera belum mengalami bencana iklim ekstrem, kendala utama yang dihadapi dalam ketahanan iklim adalah akses air bersih, terutama di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, menambah beban ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, desa menunjukkan keberhasilan dalam perlindungan lingkungan laut melalui praktik nelayan yang ramah lingkungan dengan dukungan Fasilitas penangkapan ikan dan perahu dari pemerintah desa. Namun, dominasi lahan perkebunan sawit seluas 0,95 kilometer menimbulkan kekhawatiran terkait ekosistem darat dan keanekaragaman hayati, meskipun desa telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai upaya mitigasi. Dalam hal kemitraan pembangunan desa, kerja sama dengan PT SKP telah terjalin lama untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan, tetapi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan masih menemui kendala dalam peningkatan Sumber Daya Manusia karena mayoritas penduduk adalah petani kelapa sawit.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terkait hasil penelitan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Adaptasi Desa Pesisir Dalam Mewujudkan SDGs Desa Kabupaten Kutai Timur Studi Kasus Desa Mandu Pantai Sejahtera, terdapat saran untuk perkembangan lebih lanjut untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Mandu Pantai Sejahtera sebagai berikut:

1. Disarankan agar Pemerintah Desa Mandu Pantai Sejahtera dapat memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) secara optimal untuk memprioritaskan perbaikan dan perawatan jalan usaha tani yang ada di wilayah kilo 8. Selain itu, diharapkan juga untuk pemerintah desa terus memperkuat kerjasama dengan pihak perusahaan serta selalu melibatkan masyarakat setempat dalam setiap pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi sesuai kebutuhan nyata masyarakat di Desa Mandu Pantai Sejahtera.
2. Disarankan agar Pemerintah Desa Mandu Pantai Sejahtera dapat membuat program baru untuk penanganan sampah rumah tangga. Program tersebut dapat berupa pembuatan pupuk organik ataupun bisa kerajinan tangan dari sampah plastik yang di daur ulang dan bernilai ekonomi. Dengan demikian selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Dengan belum adanya sarana dan prasarana pendukung embung yang ada di RT 001, Pemerintah Desa Mandu Pantai Sejahtera di harapkan dapat memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk membeli kebutuhan sarana dan prasarana embung, seperti pipa saluran air, pompa dan peralatan pendukung lainnya. agar dapat melengkapi perlengkapan embung. Ini penting untuk mempercepat akses air bersih serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Disarankan Pemerintah Desa Mandu Pantai Sejahtera dapat membuat program berkelanjutan, seperti pelatihan khusus kepada para nelayan agar dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan, misalnya melalui program belajar bersama nelayan dari luar desa. Selain itu, pemerintah desa juga dapat mendorong pengembangan produk olahan hasil laut yang ada, seperti abon ikan maupun olahan kepiting, untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian masyarakat.
5. Disarankan agar Pemerintah Desa Mandu Pantai Sejahtera dapat melakukan inovasi dalam memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga penggunaannya lebih berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. program yang dikembangkan sebaiknya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan diversifikasi hasil perkebunan, pengelolaan lahan berkelanjutan, serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan rumah tangga seperti tanaman hidroponik. Dengan demikian, kegiatan ekonomi

masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor perkebunan sawit semata, akan tetapi juga menciptakan keseimbangan ekologis dan ekonomi di wilayah desa.

6. Disarankan agar Pemerintah Desa Mandu Pantai Sejahtera memperkuat lagi kerja sama dengan pihak Perusahaan PT SKP dan masyarakat dalam menghidupkan kembali usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui budidaya tanaman pangan yang dapat diolah menjadi produk unggulan dari desa. Selain itu mengingat belum adanya kerjasama antar desa yang ada di sekitar desa disarankan pemerintah desa dapat menjalin kerja sama antar desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Kolaborasi antar desa dapat mencakup bidang ekonomi, sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur yang saling mendukung.

Daftar Pustaka

- Iskandar. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Buku Obor
- Ismowati, M., Abbas, S., & Putri, A. (2022). Sosialisasi Peran Pemuda Dalam SDGs Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(12), 2315–2322.
- Nasrullah, N. (2022). The Role Of Youth In Program Achievement Sustainable Development Goals (SDGs). *Al-Irfan : Journal Of Arabic Literature And Islamic Studies*, 5(2), 246–266. <https://doi.org/10.36835/Alirfan.V5i2.5920>
- Peraturan Menteri Desa No 21 Tahun 2020, 1 BPK RI 1. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Peraturan Presiden No 111 Tahun 2022. (N.D.). *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 124956, 1–11. <https://peraturan.bpk.go.id/details/227039/perpres-no-111-tahun-2022>
- Raharjo. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Pt Bumi Aksara. <https://books.google.co.id>
- Saputri, W., Andryan, W., & Khodijah. (2021). Pembangunan Berkelanjutan SDGs 2030 : Zero Hunger (Goal2). *Ilmu Kelautan Dan Perikanan*, June, 4–14. <https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.27974.60489>
- Sayuti, M., Hasanuddin, & Achmad, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan SDGs Desa Untuk Kesejahteraan Hidup. *Jambura Journal Of Husbandry And Agriculture Community Serve*, 1(2), 50–55. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjhcs/index>
- Subagiyo, Wijayanti, Z. (2017). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* (Tim Ub Pres (Ed.)). <https://books.google.co.id>
- Transformasi Digital Desa*. (N.D.). Retrieved May 20, 2025, From <https://profil.digitaldesa.id/>
- Undang-Undang No 6 Tahun, 18-April-2 BPK RI 45 (2014).

<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
Yanti, S. D., & Indahsari, K. (2024). Februari 2024, Hal 152-170 Dampak Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 5(1), 152–170. <https://doi.org/10.21107/Bep.V5i1.26135>